

BAB 6

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Penelitian ini mencoba untuk menjadi alat yang penting bagi peningkatan inklusi keuangan di Indonesia, secara khusus di Pulau Jawa. Penelitian ini menggunakan modal sosial sebagai tolok ukur untuk mengetahui seberapa besar pengaruh jaringan terhadap peningkatan inklusi keuangan.

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan beberapa hal mengenai dampak positif modal sosial sebagai peranan dalam meningkatkan inklusi keuangan di Pulau Jawa.

Pertama, ditemukan bahwa masih banyak masyarakat menengah ke bawah di Pulau Jawa yang sangat erat kesetiakawanan sosialnya (modal sosial itu sendiri) atau mementingkan jaringan sosialnya. Maka, secara umum inklusi keuangan di Pulau Jawa banyak dipengaruhi terutama oleh status atau kedudukan dalam kelompok dan tingkat kehadiran dalam kegiatan sosial, serta beberapa faktor lain seperti memberikan pendapat pada rapat, keanggotan dalam suatu organisasi, kemudahan mendapat pertolongan, dan anak yang bersahabat dengan orang yang berbeda agama.

Menariknya keterlibatan tokoh agama –khususnya di lingkup kalangan menengah ke bawah- secara regresi menunjukkan arah negative. Maksudnya, jika

seseorang semakin percaya tokoh agama, maka ia semakin tidak mau meminjam uang. Tetapi pengaruh ini tidak mempengaruhi seseorang untuk meminjam atau menabung di bank.

Kedua, semakin aktif anggota masyarakat melibatkan diri dalam modal sosial, maka semakin terbuka wawasan mereka, khususnya dalam hal keuangan. Mereka yang aktif, otomatis akan lebih menonjol dibanding masyarakat yang tidak aktif, sehingga besar kemungkinan mereka dapat menularkan wawasan dan bahkan mengajak masyarakat sekitarnya untuk mengambil kebijakan keuangan serupa (memanfaatkan fasilitas peerbankan yang sama, dsbg.).

Ketiga, masyarakat yang aktif dalam modal sosial, akan sangat mudah menerima edukasi sebab memiliki pikiran yang terbuka. Hal ini akan mendukung pemerintah dalam peningkatan inklusi keuangan, sebab modal sosial tersebut dapat menjadi sasaran dan sarana edukasi pemerintah.

6.2 Saran

Dalam upaya penanganan edukasi jasa perbankan, pemerintah bisa bekerja dengan swasta dalam hal ini adalah bank. Akan sangat efektif jika pihak bank mampu bekerja sama dengan masyarakat yang dinilai memiliki andil yang cukup besar di lingkungannya, karena berdasarkan karakteristik masyarakat Pulau Jawa, kebanyakan mereka lebih mudah memercayai orang yang cukup berpengaruh di sekitarnya, terlebih lagi kepada orang-orang yang mempunyai kedudukan dalam suatu organisasi atau kelompok.

Pihak bank bisa bekerjasama dengan organisasi atau kelompok setempat untuk memberdayakan masyarakat kecil, yaitu masyarakat yang relatif berpendapatan rendah supaya mereka terinklusii keuangan. Misal dengan memberikan kredit usaha atau memberikan penyuluhan tentang jasa keuangan.

Selanjutnya, dari segi masyarakat, modal sosial dapat dimaksimalkan perannya dengan meningkatkan interaksinya dengan masyarakat dan memperluas jaringannya. Maka modal sosial ini dapat turut mendorong masyarakat yang tadinya tidak aktif, dapat turut melibatkan diri dalam interaksi sosial yang lebih luas dan memacu pertumbuhan modal sosial yang baru. Hal ini bisa dilakukan dengan menambah jenis kegiatan kemasyarakatan atau dengan sengaja mengadakan kegiatan edukasi masyarakat yang berkaitan dengan inklusi keuangan. Modal sosial yang ada dalam masyarakat dapat mengajak atau melibatkan instansi/pihak perbankan, kelompok atau organisasi masyarakat setempat, sehingga bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah atau instansi keuangan yang bersangkutan (dalam hal ini bank). Dengan kata lain, kerja sama -yang berkaitan dengan inklusi keuangan- yang lahir dari inisiatif masyarakat akan membantu pemerintah meningkatkan inklusi keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahlin, C., & Townsend, R. (2007). Using repayment data to test across models of joint liability lending. *The Economic Journal*, 117, F11–F51.
- Aryeetey, E. (1996). *Rural finance in Africa: Institutional development and access for the poor*. Paper presented to the Annual Bank Conference on Development Economics, April 25–26. Washington, DC: World Bank.
- Aryeetey, E. (2005). Informal finance for private sector development in Sub Africa. *Journal of Microfinance*, 7, 13–38.
- Badan Pusat Statistik. (2014). *Statistik modal sosial*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2017). *Strategi Nasional dalam pencapaian target pengurangan kemiskinan*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Bank Indoensia. (2014). *Booklet Financial Inclusion*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Biggs, T., Raturi, M., & Srivastava, P. (2002). Ethnic networks and access to credit: Evidence from the manufacturing sector in Kenya. *Journal of Economic Behavior and Organization*, 49, 473–486.
- Fafchamps, M., & Minten, B. (2002). Returns to social network capital among traders. *Oxford Economic Papers*, 54, 173– 206.
- Ghatak, M. (1999). Group lending, local information and peer selection. *Journal of Development Economics*, 60, 27–50.
- Ghatak, M. (2000). Screening by the company you keep: Joint liability lending and the peer selection effect. *The Economic Journal*, 110, 601–631.
- Ghatak, M., & Guinnane, T. (2001). The economics of lending with joint liability: Theory and practice. *Readings in the theory of economic development*, 411, 195–228.
- Gomez, R., & Santor, E. (2001). Membership has its privileges: The effect of social capital and neighbourhood characteristics on the earnings of microfinance borrowers. *Canadian Journal of Economics/Revue Canadienne d'Economique*, 34, 943–966.

- Grootaert, C. (2001). *Does social capital help the poor? A synthesis of findings from the local level institutions studies in Bolivia, Burkina Faso and Indonesia* (World Bank Local Level Institutions Working Paper No. 10). Washington, DC: World Bank.
- Guiso, L., Sapienza, P., & Zingales, L. (2004). The role of social capital in financial development. *American Economic Review*, 94, 526–556.
- Homans, G. C. (1974). *Social behavior: It's Elementary Forms* (2nd ed.). New York, NY: Harcourt, Brace, and World.
- Johannes, T. (2009). Does social capital determine poverty? Evidence from cameroon household survey.
- Karlan, D. S. (2007). Social connections and group banking. *The Economic Journal*, 117, F52–F84.
- Khaki, A. & Sangi. (2016). Financial inclusion & social capital: a case study of SGSY beneficiaries in Kasmir Valley. *Independent Journal of Management & Production*.
- Munene, J. C., Schwartz, S. H., & Kibanga, G. M. (2005). *Escaping from behavioral poverty in Uganda: The role of culture and social capital*. Kampala: Fountain Publishers.
- Narayan, D., & Pritchett, L. (1997) *Cents and sociability: Household income and social capital in Rural Tanzania* (World Bank Policy Research Working Paper No. 1796).
- Okello, G., & Bongomin, C. (2015). Social Capital: Mediator of financial literacy and financial inclusion in Rural Uganda. *Review of International Business and Strategy*.
- Okten, C., & Osili, U. (2004). Social networks and credit access in Indonesia. *World Development*, 32, 1225–1246. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2004.01.012>
- Ototritas Jasa Keuangan. (2017). *Survei nasional literasi dan inklusi keuangan 2016*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.

- Rangrajan Committee. (2008) Report of the Committee on Financial Inclusion, Government of India.
- Sanjaya, I., & Nursechafia. (2017). Inklusi keuanagn dan pertumbuhan inklsuif analisis antar provinsi di Indonesia. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*.
- van Bastelaer, T. (2000a, February). *Does social capital facilitate the poor's access to credit? A review on the microeconomic literature* (Social Capital Initiative Working Paper No. 8). Washington, DC: The World Bank.
- van Bastelaer, T. (2000b). *Imperfect information, social capital and the poor's Access to credit* (World Bank Working Paper No. 234). Washington, DC: The World Bank.
- Vidya. (2017). Social capital a mediator of financial inclusion development in Rural Kerala.
- Woolcock, M. (1998). Social capital and economic development: Toward a theoretical synthesis and policy framework. *Theory and Society*, 27, 151–208. <http://dx.doi.org/10.1023/A:1006884930135>
- World Bank Social Capital Initiative. (2002). *Social Capital Initiative Working Papers Series*. Washington, DC: The World Bank.

